

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Setyawan, 2007 : 1). Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah dari tahun ketahun terus meningkat. Peran pokok usaha kecil ini adalah : (1) sebagai penyerapan tenaga kerja, (2) sebagai penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah, (3) sebagai penghasil devisa negara yang potensial karena keberhasilannya dalam memproduksi komoditi ekspor non migas (Glendoh, 2001 : 1). Perkembangan sektor UKM

yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh.

Dalam upaya berkembang atau bahkan tetap hidup, UKM menghadapi berbagai kendala atau masalah antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan. Pendidikan didefinisikan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal. Pelaku usaha sektor kecil hendaknya memahami teknologi informasi, agar apa yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat dijalankan. Dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Dalam artikel Suhairi dan Wahdini (2006 : 2) disebutkan bahwa *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dirasakan sangat memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar*. Salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya overload adalah rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM, dan adanya kewajiban UKM yang sama dengan usaha besar. Dengan kata lain, UKM diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan menggunakan standar akuntansi keuangan internasional.

Namun saat ini pemerintah Indonesia sudah mengatur secara khusus kewajiban UKM untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 19 Mei 2009. Standar ini dikemas cukup ringkas jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UKM masih sangat rendah. Dan SAK ETAP juga masih dianggap memberatkan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Perusahaan atau pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan didalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UKM di Indonesia.

Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. (Setyawan, 2007 : 2).

Berdasarkan observasi sementara diperoleh informasi bahwa sebagian UKM di Jakarta Utara telah mencatat aktivitas keuangan usaha mereka. Meskipun belum sempurna bentuk dan urutan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dimana penelitian ini muncul dikarenakan beberapa permasalahan yang ada. Antara lain: wawancara yang telah dijelaskan diatas, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini sulit untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pemahaman Teknologi Informasi dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Kebutuhan SAK ETAP Bagi UKM (Studi Kasus pada UKM di Jakarta Utara)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan pemilik berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
2. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
3. Apakah karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.1) Untuk mengetahui apakah pendidikan pemilik berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
- 1.2) Untuk mengetahui apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
- 1.3) Untuk mengetahui apakah karakteristik laporan keuangan berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

1.3.a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama di bangku perkuliahan di dalam dunia kerja.

1.3.b. Dapat digunakan sebagai referensi, sumbangan pemikiran dan dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan agar dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik.